



**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI REALISASI PAJAK DAERAH DENGAN  
SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL PADA BPKPAD KABUPATEN  
TEMANGGUNG TAHUN 2023-2024**

Ana Aulia<sup>1</sup> Siti Afidatul Khotijah<sup>2</sup>  
Universitas Tidar<sup>1,2</sup>

[Anaaulia11829@gmail.com](mailto:Anaaulia11829@gmail.com)<sup>1</sup>, [Khotijah\\_afi@untidar.ac.id](mailto:Khotijah_afi@untidar.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstract**

*BPKPAD is a local government institution that has an important role in financial management at the district or city level. Digital payments have become an increasingly popular trend in recent years. Local governments have also begun to adopt digital payments as one way to improve the efficiency and effectiveness of collecting local tax realization. This study aims to determine the effectiveness of the implementation of local tax realization with a digital payment system at BPKPAD Temanggung Regency. This research uses secondary data analysis method obtained from BPKPAD Temanggung Regency. The data used is data on local tax revenue from 2023 and 2024. The results showed that digital payments have been implemented and increased the realization of local taxes at BPKPAD Temanggung Regency. The percentage of non-cash (digital) payments increased from 34% in 2023 to 43.30% in 2024.*

**Keywords:** *BPKPAD, Digital Payment. Tax, Realization.*

**Abstrak**

BPKPAD Merupakan lembaga pemerintah daerah yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan di tingkat kabupaten atau kota. Pembayaran digital telah menjadi tren yang semakin populer dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah daerah juga telah mulai mengadopsi pembayaran digital sebagai salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengumpulan realisasi pajak daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas implementasi realisasi pajak daerah dengan sistem pembayaran digital pada BPKPAD Kabupaten Temanggung. Penelitian ini menggunakan metode analisis data sekunder yang diperoleh dari BPKPAD Kabupaten Temanggung. Data yang digunakan adalah data tentang penerimaan pajak daerah dari tahun 2023 dan 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran digital telah terimplementasi dan meningkatkan realisasi pajak daerah pada BPKPAD Kabupaten Temanggung. Persentase pembayaran non-tunai (digital) meningkat dari 34% di tahun 2023 menjadi 43,30% di tahun 2024.

**Kata kunci:** *BPKPAD, Pembayaran Digital. Pajak, Realisasi.*

**PENDAHULUAN**

Era digital adalah sebuah periode dalam sejarah di mana berbagai aspek kehidupan mengalami kemajuan pesat melalui penerapan teknologi digital,



sehingga hampir seluruh aktivitas manusia bertransformasi menuju sistem yang serba digital dan terhubung secara elektronik. Hadirnya era digital mampu menjadikan kehidupan masyarakat menjadi lebih praktis dan juga modern dalam banyak aspek termasuk perekonomian. Kemajuan teknologi dan informasi telah mengubah cara masyarakat di Indonesia dan di seluruh dunia berinteraksi dengan layanan digital. Kemajuan teknologi dan informasi mendorong transformasi digital dalam berbagai layanan masyarakat, seperti makanan, transportasi, pakaian, dan digitalisasi pembayaran, seperti pada pelayanan pembayaran pajak daerah. Digitalisasi layanan ini membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pemungutan pajak melalui penerapan sistem perpajakan digital yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Digitalisasi pengelolaan pajak daerah menjadi inovasi krusial di era teknologi informasi, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak. Seperti di Kabupaten Temanggung telah mengimplementasikan sistem e-keuangan untuk mengelola laporan keuangan daerah. Sistem ini dinilai efektif dan memudahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaporkan posisi keuangan daerah. Implementasi sistem berbasis website ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah dan memberikan kepuasan kepada masyarakat. Pembayaran Pajak daerah secara online telah membawa dampak positif yang signifikan terhadap pelaku usaha dan responsivitas terhadap dinamika ekonomi lokal.

Implementasi sistem pembayaran digital ini tidak hanya mempermudah proses administrasi, tetapi juga meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepercayaan wajib pajak. Selain itu, sistem pembayaran digital memungkinkan pemerintah daerah untuk memantau dan mengawasi penerimaan pajak secara real-time, sehingga meminimalisir potensi kebocoran dan kecurangan dalam pemungutan pajak. Hal ini meningkatkan transparansi pengelolaan pajak yang berdampak positif pada kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dengan transparansi yang lebih baik, wajib pajak merasa lebih yakin bahwa pajak yang dibayarkan dikelola secara profesional dan bertanggung jawab, yang pada gilirannya mendorong peningkatan kepatuhan pajak serta memberikan kemudahan untuk kebijakan pajak. Kebijakan pajak memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi, terutama di negara berkembang. Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan proyek pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Melalui kebijakan pajak yang efektif, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan vital bagi pemerintah daerah di Indonesia, yang berfungsi untuk mendukung pembangunan dan penyediaan layanan publik. Pajak Daerah dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan, baik oleh individu maupun badan hukum, dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi tanpa imbalan langsung yang seimbang, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Namun, adopsi pembayaran digital dalam sektor pajak daerah juga menghadapi berbagai tantangan. Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang belum merata, literasi digital masyarakat yang masih rendah, dan kekhawatiran akan keamanan sistem pembayaran digital menjadi beberapa



hambatan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan membahas efektivitas implementasi realisasi pajak daerah dengan sistem pembayaran digital pada BPKPAD Kabupaten Temanggung tahun 2023-2024.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam laporan ini adalah dengan metode kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami, menggambarkan, dan mendeskripsikan fakta-fakta, karakteristik, serta hubungan antara fenomena yang diteliti secara sistematis dan rinci. Selain itu, tujuan lain dari penelitian kualitatif adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam menjawab rasa ingin tahu dengan pemahaman yang mendalam, mengembangkan teori, dan mendeskripsikan realitas.

Objek penelitian ini yaitu kantor Dinas BPKPAD Kabupaten Temanggung yang beralamat Jl. Pahlawan No.94, Gentan, Purworejo, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56277.

Sumber data yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dalam penelitian ini harus dinyatakan dengan jelas. Penulis menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. berdasarkan sumbernya data penelitian terbagi menjadi 2 yaitu:

### **Data Primer**

Data primer dalam penelitian ini berasal dari wawancara terhadap salah satu staf pegawai BPPKAD Kabupaten Temanggung. Data yang diperoleh berupa dasar hukum penerapan sistem pembayaran digital pada BPKPAD Kabupaten Temanggung, prosedur yang telah dilaksanakan, serta dokumen yang diperlukan dalam penerapan sistem pembayaran digital.

### **Data Sekunder**

Data sekunder adalah data atau informasi yang terkait secara tidak langsung dengan permasalahan penelitian tertentu. Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa peraturan pemerintah, dokumentasi, serta laporan realisasi pajak daerah pada BPKPAD Kabupaten Temanggung.

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain wawancara, observasi, dan dokumentasi.

### **Wawancara (*Interview*)**

Wawancara adalah sebuah proses interaksi yang melibatkan dua orang yang saling memberikan respon dengan tujuan tertentu dalam konteks penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan di BPKPAD Kabupaten Temanggung pada maret 2025 bersama salah satu staf Pegawai BPKPAD Kabupaten Temanggung sebagai responden untuk memperoleh data terkait penerapan pembayaran digital terhadap realisasi pajak bumi dan bangunan daerah pada BPKPAD Kabupaten Temanggung.

### **Observasi**

observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan pada BPPKAD Kabupaten Temanggung yang berfokus pada Pengimplementasian pembayaran digital terhadap realisasi pajak bumi dan bangunan dengan tujuan untuk memperoleh data berkaitan dengan dokumen serta penerapan sistem pembayaran digital yang dilakukan pada BPPKAD Kabupaten Temanggung.



#### Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi melalui analisis dokumen yang sudah ada, seperti catatan tertulis, gambar, rekaman video, dan arsip lainnya. Teknik ini sangat berguna dalam penelitian karena memungkinkan peneliti untuk mengakses data yang relevan dan dapat diandalkan tanpa harus melakukan pengumpulan data secara langsung. Dalam penelitian ini dapat diperoleh dari foto dokumen terkait pembayaran digital pada dinas BPKPAD Kabupaten Temanggung.

Analisis data dalam penelitian kualitatif Dalam konteks ini, penulis mencari dan mengolah data terkait implementasi realisasi pajak dengan sistem pembayaran digital melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses reduksi data kemudian dilanjutkan dengan memilah data berdasarkan sumber yang diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung. yaitu mengumpulkan data tentang pembayaran digital dan realisasi pajak daerah pada BPKPAD Kabupaten Temanggung.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf bagian perencanaan dan penetapan pajak Pengimplementasian pembayaran digital pada BPKPAD Kabupaten Temanggung berupa perjanjian Kerjasama dengan bank Jateng. Jenis pembayaran digital pada BPKPAD Kabupaten Temanggung ada beberapa cara yaitu bisa melalui agen bank, ATM, EDC, UE Reader, Mobile banking, Qris, dan E commerce Yang dipantau oleh pihak BPKPAD melalui web pajak temanggungkab.go.id dan informasi data dari pihak bank Jateng. Penggunaan berbagai metode ini tidak hanya memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi, tetapi juga meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan pajak dan retribusi daerah.

namun, penggunaan sistem pembayaran digital juga memiliki tantangan yang pertama kompetensi sumber daya manusia (SDM) pemerintah daerah menjadi salah satu tantangan utama. Banyak pegawai pemerintah daerah yang belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mengoperasikan sistem pembayaran digital. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dan kegagalan dalam proses pembayaran, sehingga mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Kedua, minat masyarakat dalam bertransaksi non-tunai masih relatif rendah. Banyak masyarakat yang masih lebih memilih untuk melakukan transaksi secara tunai karena kurangnya pengetahuan dan kepercayaan terhadap sistem pembayaran digital. Hal ini dapat menyebabkan rendahnya adopsi pembayaran digital dan mempengaruhi efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah. Ketiga, infrastruktur IT dan jaringan telekomunikasi internet masih menjadi tantangan utama. Banyak daerah yang masih memiliki infrastruktur IT dan jaringan telekomunikasi internet yang terbatas, sehingga mempengaruhi kecepatan dan keandalan sistem pembayaran digital. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dan kegagalan dalam proses pembayaran, sehingga mempengaruhi kepercayaan masyarakat.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, pemerintah daerah perlu melakukan upaya-upaya strategis untuk meningkatkan kompetensi SDM, meningkatkan minat masyarakat dalam bertransaksi non-tunai, dan





infrastruktur IT dan jaringan telekomunikasi internet. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah melalui implementasi pembayaran digital. Seperti pelatihan dari bank Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, melaksanakan sosialisasi kepada Masyarakat terkait sistem pembayaran digital, dan melakukan koordinasi dengan Kementerian komunikasi dan informatika (kominfo).

Realisasi Pajak per kanal Pembayaran tahun 2023

Jenis pajak	Tunai	Non tunai (Digital)	Presentase Non Tunai (Digital)
HOTEL	Rp 223.531.750	Rp 28.219.000	11,20%
RESTORAN	Rp 2.103.603.797	Rp 824.678.060	28,16%
HIBURAN	Rp 13.056.250	Rp 80.849.000	86,09%
REKLAME	Rp 851.547.970	Rp 97.669.119	10,28%
PARKIR	Rp 106.738.501	Rp 16.421.300	13,33%
AIR TANAH	Rp 201.916.273	Rp 81.559.247	28,77%
BPHTB	Rp 22.232.718.652	Rp 102.561.025	0,45%
PBB	Rp 21.202.628.083	Rp 4.819.663.411	18,52%
PJU	Rp -	Rp 18.104.026.598	100%
<b>TOTAL</b>	Rp 46.935.741.276	Rp 24.155.646.760	33,97%
PRESENTASE	66%	34%	33,97%

Data yang disajikan menggambarkan tahun 2023 penerimaan pajak tunai dan non-tunai (digital) dari berbagai sektor. Secara keseluruhan, total penerimaan pajak mencapai Rp 71.091.388.036, dengan komposisi 66% (Rp 46.935.741.276) berasal dari pembayaran tunai dan 34% (Rp 24.155.646.760) dari pembayaran non-tunai. Persentase pembayaran non-tunai secara keseluruhan adalah 33,97%. Ini menunjukkan bahwa meskipun pembayaran tunai masih mendominasi, pembayaran digital telah menjadi kontributor signifikan dalam penerimaan pajak. Sektor pajak penerangan jalan umum Menonjol dengan 100% penerimaan berasal dari pembayaran non-tunai. Ini mengindikasikan efektivitas sistem pembayaran digital yang telah diterapkan, kemungkinan besar terintegrasi dengan tagihan listrik atau platform online.

Sektor pajak hiburan Memiliki persentase pembayaran non-tunai tertinggi, yaitu 86,09%. Ini mencerminkan preferensi masyarakat yang semakin condong ke pembayaran digital dalam sektor hiburan, seperti pembelian tiket online atau



pembayaran melalui aplikasi. Dari sektor pajak restoran dan air tanah Menunjukkan kontribusi pembayaran non-tunai yang cukup signifikan, masing-masing sebesar 28,16% dan 28,77%. Ini menandakan peningkatan adopsi pembayaran digital di sektor kuliner dan penggunaan sumber daya air. Dari sektor pajak Hotel, Reklame, dan Parkir Memiliki persentase pembayaran non-tunai yang relatif rendah, berkisar antara 10-13%. Hal ini mengindikasikan potensi peningkatan penggunaan pembayaran digital di sektor-sektor ini. Dari sektor pajak bumi dan bangunan (PBB) memiliki persentase non tunai sebesar 18,52% ini menunjukkan bahwa sudah cukup baik, namun masih dapat ditingkatkan. Dan pajak Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Memiliki persentase non tunai yang sangat kecil yaitu 0,45%. Ini menunjukkan masih kurangnya penggunaan sistem pembayaran non tunai dalam sektor ini.

Realisasi Pajak per kanal Pembayaran tahun 2024

	<b>Tunai</b>	<b>Non Tunai (Digital)</b>	<b>Presentase Non Tunai (Digital)</b>
HOTEL	Rp 308.332.297	Rp 48.972.500	13,71%
RESTORAN	Rp 1.623.441.897	Rp 933.104.217	36,50%
HIBURAN	Rp 15.951.500	Rp 63.019.636	79,80%
REKLAME	Rp 735.454.299	Rp 103.600.476	12,35%
PJU	Rp -	Rp 21.017.167.844	100,00%

PARKIR	Rp 102.572.060	Rp 46.010.910	30,97%
AIR TANAH	Rp 244.597.436	Rp 104.334.599	29,90%
PBB	Rp 21.224.324.269	Rp 5.746.825.563	21,31%
BPHTB	Rp 13.200.345.491	Rp 539.103.439	3,92%
TOTAL	Rp 37.455.019.249	Rp 28.602.139.184	43,30%
PRESENTASE	56,70 %	43,30 %	

Data diatas menunjukkan penerimaan pajak tunai dan non-tunai (digital) tahun 2024 dari berbagai sektor, menunjukkan tren yang menarik dalam adopsi pembayaran digital. Secara keseluruhan, total penerimaan pajak mencapai Rp 66.057.158.433, dengan komposisi 56,70% (Rp 37.455.019.249) berasal dari pembayaran tunai dan 43,30% (Rp 28.602.139.184) dari pembayaran non-tunai. Ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam penggunaan pembayaran digital, dengan persentase non-tunai mencapai 43,30%. Sektor pajak penerangan jalan umum menggambarkan pembayaran digital dengan 100% penerimaan berasal dari non-tunai. Ini mengindikasikan



sistem yang sangat efektif dan terintegrasi.

Pajak restoran Menunjukkan peningkatan signifikan dalam pembayaran non- tunai, mencapai 36,50%. Ini menandakan adopsi yang lebih luas dari pembayaran digital di sektor kuliner. Pajak hiburan menjadi sektor dengan persentase pembayaran non-tunai tertinggi kedua, yaitu 79,80%. Ini menegaskan preferensi masyarakat terhadap pembayaran digital dalam sektor hiburan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Menunjukkan angka 21,31% dalam pembayaran non tunai, angka ini menunjukkan peningkatan dari data sebelumnya. Pajak Hotel dan Reklame. Memiliki persentase pembayaran non-tunai yang relatif rendah, yaitu 13,71% untuk hotel dan 12,35% untuk reklame. Ini menunjukkan adanya potensi besar untuk meningkatkan adopsi pembayaran digital di sektor-sektor ini.

Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). menjadi sektor dengan persentase pembayaran non tunai yang sangat rendah, yaitu 3,92%. Hal ini mengindikasikan perlu adanya perbaikan sistem pembayaran non tunai pada sektor ini.

Secara keseluruhan presentase pembayaran digital mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar 34% menjadi 43,30% pada tahun 2024. dampak pembayaran digital pada hasil pajak daerah Kabupaten Temanggung antara tahun 2023 dan 2024 menunjukkan perubahan yang signifikan dalam pola pembayaran. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin beralih ke metode pembayaran non tunai, yang dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengumpulan pajak.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis data dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Pembayaran digital meningkat dari 34% di tahun 2023 menjadi 43,30% di tahun 2024. Total penerimaan pajak meningkat dari Rp 71.091.388.036 di tahun 2023 menjadi Rp 66.057.158.433 di tahun 2024, meskipun ada penurunan, namun peningkatan persentase non tunai menunjukkan efisiensi yang lebih baik. Sektor pajak penerangan jalan umum (PJU) menjadi contoh baik yang memiliki persentase pembayaran non-tunai 100% di tahun 2023 dan 2024, menunjukkan sistem yang sangat efektif dan terintegrasi. Dan Sektor lain memiliki potensi peningkatan seperti pajak hotel, reklame, dan BPHTB memiliki persentase pembayaran non-tunai yang relatif rendah, menunjukkan adanya potensi besar untuk meningkatkan adopsi pembayaran digital. Sistem pembayaran digital terimplementasi secara positif pada BPKPAD Kabupaten Temanggung.

## **Saran**

Pemerintah Dalam menghadapi tantangan-tantangan yang masih ada, pemerintah daerah perlu melakukan upaya-upaya strategis untuk meningkatkan kompetensi SDM, meningkatkan minat masyarakat dalam bertransaksi non-tunai, dan meningkatkan infrastruktur IT dan jaringan telekomunikasi internet.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- al Qardh, J., Tarantang, J., Awwaliyah, A., Astuti, M., & Munawaroh, M. (n.d.). 60 *IAIN Palangka Raya Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia*.  
Putu, N., Krismajayanti, A., Nurmalasari, M. R., Prawitasari, P. P., Dewiningrat,



- A. I., Ayu, I., Megawati, P., Kusnita, K. L., Diah, P., & Sanjiwani, A. (2024). Tren Revolusioner: Bagaimana E-Wallet Mengubah Konsumen di Era Modern? *JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS MANAGEMENT STUDIES*, 5(1), 41–51.
- Widya Astuti, A., Muharam, A., Siber Cerdika Internasional, P., & Swadaya Gunung Jati, U. (2023). *PERKEMBANGAN BISNIS DI ERA DIGITAL*. <https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp>
- Capaian, A., Dan, K., Pengguna, P., Transaksi, S., Tunai Di Badan, N., Keuangan, P., Daerah, A., Bantul, K., Susilawati, D., Difta, W., & Fatimah, T. (2022). Article Type: Research Paper. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 05, 2– 144. <https://doi.org/10.18196/jati.v5i2.164>
- Elfanso, E., & Monica, L. (2023). Analisis dampak transaksi E- Commerce terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. *Owner*, 7(1), 841– 850. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1477>